

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**LKJIP
2023**

**LKJIP
2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai capaian kinerja tahun ke-tiga pelaksanaan RPJMD pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2021 – 2026.

Akhirnya mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Pandeglang, Maret 2024

BUPATI PANDEGLANG

Hj. IRNA NARULITA, SE, MM

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 PENDAHULUAN	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP	2
1.3 GAMBARAN UMUM	2
1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	20
1.5 SISTEMATIKA LKjIP 2023	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2026	26
2.2 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1 CAPAIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG	43
3.2 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN MISI	62
3.3 REALISASI ANGGARAN	70
BAB IV PENUTUP		
4.1 KESIMPULAN	74
4.2 SARAN	74
LAMPIRAN		
I. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023		
II. PENGHARGAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2023		

**DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1	JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023.....	4
TABEL 1.2	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023	6
TABEL 1.3	INDIKATOR KETENAGAKERJAAN PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2023	8
TABEL 1.4	KOMPOSISI PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2023	9
TABEL 1.5	ANGKA MELEK HURUF (LATIN) PENDUDUK USIA 10 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021- 2023.....	10
TABEL 1.6	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2023	11
TABEL 1.7	PRESENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DI TAMATKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023.....	12
TABEL 1.8	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021- 2023.....	13
TABEL 1.9	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH MURNI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2023	14
TABEL 1.10	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KOTOR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2023	15
TABEL 1.11	JUMLAH SEKOLAH, GURU, MURID DAN RASIO MURID- GURU MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023.....	16
TABEL 1.12	JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021- 2023	18



TABEL 1.13	JUMLAH ANGKA KESAKITAN DAN RATA- RATA LAMANYA SAKIT PENDUDUK DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2023	18
TABEL 1.14	JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DAERAH (PNS) DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023	19
TABEL 1.15	JUMLAH APARATUR PEMERINTAH DAERAH (PNS) DI KABUPATEN BERDASARKAN PENDIDIKAN PANDEGLANG TAHUN 2023	20
TABEL 2.1	PERJANJIAN KINERJA BUPATI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023.....	31
TABEL 3.10	TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023	65
TABEL 3.11	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI PERTAMA	104
TABEL 3.12	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEDUA.....	105
TABEL 3.13	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KETIGA	106
TABEL 3.14	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEEMPAT.....	107
TABEL 3.15	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KELIMA	108
TABEL 3.16	TARGET REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA MISI KEENAM	109
TABEL 3.17	CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN VISI KABUPATEN PANDEGLANG	110
TABEL 3.18	TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIT SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023	73
TABEL 3.19	TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023.....	112
TABEL 3.20	TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023.....	113
TABEL 3.21	SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023.....	114



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Pandeglang berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Tata kelola pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Evaluasi perencanaan strategis setiap tahunnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyusun LKjIP tahun 2023 yang merupakan implementasi Sistem AKIP tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Periode Tahun 2021-2026.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang diaktualisasikan dalam beberapa fungsi, urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan. Fungsi dan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 9 fungsi dan 33 urusan pemerintahan daerah yaitu:

1. Fungsi Pelayanan Umum, meliputi urusan pemerintahan daerah Perencanaan Pembangunan; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; Statistik; Kearsipan; serta Komunikasi dan Informatika.
2. Fungsi Ketentraman dan Ketertiban, meliputi urusan pemerintahan daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
3. Fungsi Ekonomi, meliputi urusan pemerintah daerah Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pertanian; dan Perindustrian.
4. Fungsi Lingkungan Hidup, meliputi urusan pemerintah daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
5. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, meliputi urusan pemerintah daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman.
6. Fungsi Kesehatan, meliputi urusan pemerintah daerah Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
7. Fungsi Pariwisata dan Budaya, meliputi urusan pemerintah daerah Kebudayaan dan Pariwisata.



8. Fungsi Pendidikan, meliputi urusan pemerintah daerah Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Perpustakaan.
9. Fungsi Perlindungan Sosial, meliputi urusan pemerintah daerah Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Sosial.

Berdasarkan pelaksanaan program/ kegiatan yang terhimpun dalam fungsi dan urusan pemerintahan daerah maka telah memberikan imbas berupa *outcome/* manfaat terhadap pencapaian target kinerja tahun 2022 yang didasarkan/ dikelompokkan dengan kedekatan antara sasaran strategis dengan misi Kabupaten Pandeglang. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut sebagaimana uraian berikut :

1. Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi: 84,46
2. Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia: 136,89%
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: 103,95%
4. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan: 92,24%
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata: 73,36%

Capaian dari masing-masing misi tersebut menghasilkan capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan visi tahun ketiga yaitu **98,18%** dan masuk pada kategori "*sangat memuaskan*".

Pencapaian kinerja pada tahun ke-dua periode 2021 - 2026 ada peningkatan dari tahun 2022 yaitu **86,19 %**, ini di karenakan adanya peningkatan dari beberapa indikator kinerja yang dikareakan pemerintah Kabupaten Pandeglang terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan indikator kinerja dengan bersinergi serta berkolaboratif dengan semua perangkat daerah, swasta dan masyarakat. Hal ini hendaknya menjadi motivasi bagi semua jajaran pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam mendukung proses pembangunan daerah serta lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Pada tahun yang akan datang, seiring dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang, penataan akuntabilitas kinerja Sistem AKIP (SAKIP). Perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara konsekuen agar dapat bermanfaat, baik bagi perencanaan maupun pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan



pembandingan capaian indikator sasaran dengan demikian LKjIP Kabupaten Pandeglang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat RPJMD Tahun 2021 – 2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP TAHUN 2022

1.2.1. Maksud

LKjIP Kabupaten Pandeglang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama Tahun 2022 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Kabupaten Pandeglang sesuai dengan RPJMD .

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) antara lain :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang ,
- c. Menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

1.3 GAMBARAN UMUM

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang memiliki andalan di bidang pariwisata dan agribisnis dengan kekhususan tersendiri yang memberikan posisi cukup strategis bagi pengembangan perekonomian dan pembangunan.

GEOGRAFIS

Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah daratan 2.747 Km² atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi Banten, dengan panjang garis pantai 307 Km dan memiliki 33 pulau kecil dengan pulau Panaitan yang paling luas. Penggunaan lahan di kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (30,41%), lahan sawah (19,93%) dan lahan kering/lainnya (49,66%).



Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1	KECAMATAN SUMUR	7	-
2	KECAMATAN CIMANGGU	12	-
3	KECAMATAN CIBALIUNG	9	-
4	KECAMATAN CIKEUSIK	14	-
5	KECAMATAN CIGEULIS	9	-
6	KECAMATAN PANIMBANG	6	-
7	KECAMATAN MUNJUL	9	-
8	KECAMATAN ANGSANA	9	-
9	KECAMATAN PICUNG	9	-
10	KECAMATAN BOJONG	8	-
11	KECAMATAN SAKETI	14	-
12	KECAMATAN CISATA	9	-
13	KECAMATAN PAGELARAN	13	-
14	KECAMATAN PATIA	10	-
15	KECAMATAN LABUAN	9	-
16	KECAMATAN JIPUT	13	-
17	KECAMATAN CIKEDAL	10	-
18	KECAMATAN MENES	12	-
19	KECAMATAN MANDALAWANGI	15	-
20	KECAMATAN CIMANUK	11	-
21	KECAMATAN CIPEUCANG	10	-
22	KECAMATAN BANJAR	11	-
23	KECAMATAN KADUHEJO	10	-
24	KECAMATAN PANDEGLANG	-	4
25	KECAMATAN CADASARI	11	-
26	KECAMATAN KARANGTANJUNG	-	4
27	KECAMATAN CIBITUNG	10	-
28	KECAMATAN CARITA	9	-
29	KECAMATAN SUKARESMI	10	-
30	KECAMATAN MEKARJAYA	8	-
31	KECAMATAN SINDANGRESMI	9	-
32	KECAMATAN PULOSARI	9	-
33	KECAMATAN KORONCONG	12	-
34	KECAMATAN MAJASARI	-	5
35	KECAMATAN SOBANG	8	-

Sumber : Data BPS Pandeglang Dalam Angka 2023

TOPOGRAFI

Secara umum bentuk topografi wilayah Kabupaten Pandeglang di daerah Tengah dan Selatan pada umumnya merupakan dataran dengan gunung-gunung yang ketinggiannya rendah (Gunung Payung, Gunung Honje, Gunung Tilu dan Gunung Raksa). Luas wilayah bagian selatan sekitar 85,07% dari wilayah luas kabupaten. Sedangkan daerah utara sekitar 14,93% dari luas kabupaten merupakan dataran tinggi, dimana terdapat gunung-gunung yang cukup tinggi (Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Asepun). Kabupaten Pandeglang memiliki sumber daya air yang relatif cukup banyak, hal ini nampak dari terdapatnya aliran 14 sungai yang bermuara di Selat Sunda dan 4 sungai yang bermuara di Samudera Indonesia.

DEMOGRAFI

Kependudukan erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Di lain pihak permasalahan yang menyangkut kependudukan sangat kompleks, untuk itu keberadaan informasi kependudukan sangat penting sebagai acuan dasar dalam setiap pengambilan kebijakan.

Penduduk Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2023 tercatat berjumlah 1.401.797 jiwa terdiri dari laki-laki 719.924 jiwa dan perempuan 681.873 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.346 KK, dengan penambahan penduduk dari Tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 34.324 jiwa. Sedangkan Kepadatan penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2023 adalah 510 orang/ km² dengan sebaran penduduk relatif tidak merata, kecamatan dengan penduduk terjarang yaitu Kecamatan Sumur dengan rata-rata sebanyak 92 orang/ km² sementara wilayah yang terpadat adalah Kecamatan Labuan yaitu sebanyak 3.622 orang/ km², sementara Laju Pertumbuhan Penduduk selama tahun 2022-2023 rata-rata sebesar 2,51 persen per tahun.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
			L	P	
1	SUMUR	9.400	13.937	13.528	27.465
2	CIMANGGU	15.305	21.733	20.967	42.700
3	CIBALIUNG	11.073	17.194	16.185	33.379
4	CIKEUSIK	21.031	30.774	29.303	60.077
5	CIGEULIS	13.823	21.150	19.610	40.760
6	PANIMBANG	20.035	30.245	28.803	59.048
7	ANGSANA	10.969	15.898	15.187	31.085
8	MUNJUL	9.394	14.095	13.543	27.638
9	PAGELARAN	14.265	21.382	20.655	42.037
10	BOJONG	13.665	20.651	19.601	40.252
11	PICUNG	14.057	21.904	20.770	42.674
12	LABUAN	19.327	31.097	29.203	60.300
13	MENES	14.125	22.419	21.220	43.639
14	SAKETI	16.747	26.407	25.402	51.809
15	CIPEUCANG	10.972	17.770	16.236	34.006
16	JIPUT	12.177	18.614	17.985	36.599
17	MANDALAWANGI	19.394	31.354	29.659	61.013
18	CIMANUK	14.298	24.044	22.640	46.684
19	KADUHEJO	13.995	20.748	18.825	39.573
20	BANJAR	12.116	14.353	13.600	27.953
21	PANDEGLANG	14.924	24.044	22.640	46.684
22	CADASARI	12.174	20.748	18.825	39.573
23	CISATA	9.449	14.353	13.600	27.953
24	PATIA	11.167	16.573	15.851	32.424
25	KARANG TANJUNG	12.325	20.657	19.470	40.127
26	CIKEDAL	12.528	19.070	18.314	37.384
27	CIBITUNG	8.360	12.498	11.746	24.244
28	CARITA	13.059	19.160	18.611	37.771
29	SUKARESMI	13.819	20.774	19.909	40.683
30	MEKARJAYA	7.963	12.888	12.214	25.102
31	SINDANGRESMI	9.056	13.171	12.617	25.788
32	PULOSARI	10.864	18.494	17.097	35.591
33	KORONCONG	7.196	12.411	11.486	23.897
34	MAJASARI	17.352	30.331	28.019	58.350
35	SOBANG	14.864	20.743	20.541	41.284
KAB. PANDEGLANG		461.268	719.924	681.873	1.401.797

Sumber : Data Disdukcapil Tahun 2023

WILAYAH ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN

Kabupaten Pandeglang secara administratif sampai akhir tahun 2023 secara administratif jumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang berjumlah 35 Kecamatan dengan jumlah kelurahan dan desa sebanyak 13 kelurahan dan 326 desa.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dibagi menjadi rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaan.

A. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan terdiri dari :

- PKW dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
- PKWP dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, jasa keuangan/bank, simpul transportasi dan pusat jasa kemasyarakatan;
- PKL dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
- PKLp dengan fungsi utama sebagai pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala lokal; dan
- PPK dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.

B. Rencana system pengembangan perdesaan terdiri dari :

- ✓ Pengembangan PPL dengan fungsi utama sebagai pusat permukiman dengan skala kegiatan antar desa.
- ✓ Pengembangan kawasan agropolitan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi pertanian di kawasan perdesaan
- ✓ Pengembangan kawasan minapolitan dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan potensi perikanan budidaya air tawar di kawasan perdesaan meliputi:

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Kebijaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya ini menyangkut berbagai aspek yang sangat kompleks, selain berdampak terhadap ekonomi juga terhadap sosial politik masyarakat, termasuk tenaga kerja. Keberhasilan pembangunan bidang sosial tidak harus dapat dilihat dari segi fisik yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana sedangkan segi mental meliputi kondisi mental penduduknya.

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial. Bersumber dari BPS Kabupaten Pandeglang, angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 10 tahun keatas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2023 sebanyak 1.401.797 orang terdapat 978.683 orang atau 69,81% merupakan Penduduk Usia Kerja (PUK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 590.432 orang atau sekitar 60,33 % merupakan angkatan kerja dan sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 1.3

Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2022 - 2023

NO.	KARAKTERISTIK	TAHUN	
		2022	2023
1	2	3	4
1	Penduduk Usia Kerja (PUK)	893.567	978.638
2	Angkatan Kerja (AK)	550.932	590.432
	a. Bekerja	500.002	537.036
	b. Pengangguran (Mencari Kerja)	50.901	53.406
3	Bukan Angkatan Kerja	342.635	388.206
	a. Sekolah dan Mengurus RT	-	-
	b. Mengurus RT	-	-
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	61,66	60,33
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,24	9,04
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	90,76	90,43

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan rumah tangganya dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dari hasil Sakernas tahun 2023, terlihat bahwa partisipasi penduduk usia kerja Kabupaten Pandeglang dalam bekerja dan mencari pekerjaan sebesar 60,33%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurunan dari 61,66% pada tahun 2022. Bila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan angka yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 81,21% sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 40,97%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan dalam upaya mendapatkan penghasilan/pendapatan baik untuk dirinya maupun untuk rumah tangganya.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja pada tahun 2023 dapat dilihat dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 90,43 persen, angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 90,67% persen.

Tabel 1.4

Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2023

Lapangan Usaha	(%)
1. Pertanian	33,57
2. Industri Pengolahan	17,65
3. Perdagangan, Hotel & Restoran	48,78
4. Jasa Kemasyarakatan	
5. Lainnya*)	
Jumlah (jiwa)	

Sumber : BPS Kab. Pandeglang Tahun 2023

*) Lainnya : sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor LGA, sektor Konstruksi, sektor Angkutan/Transportasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing masyarakat/penduduk dalam memasuki dunia kerja. Dengan pendidikan pula, pemerintah akan lebih mudah dalam mentransfer tujuan pembangunan kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat akan lebih baik kalau pendidikan juga lebih baik.

Tolak ukur yang sangat mendasar di bidang pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis (Angka Melek Huruf) penduduk dewasa. Kemampuan membaca dan menulis dibedakan terhadap huruf latin, huruf lainnya, dan tidak dapat membaca dan menulis. Dalam tulisan ini yang dimaksud buta huruf adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin akan menjadikan seseorang lebih mudah memahami dan menyerap berbagai informasi baik dari media cetak maupun elektronik sehingga akan menambah pengetahuan bagi dirinya.

Kemampuan baca tulis tercermin dari indikator Angka Melek Huruf. Penduduk berusia 15 tahun ke atas di Pandeglang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2022 mencapai 98,11 persen, sisanya sebanyak 1,89 persen adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 45 tahun ke atas.

Tabel 1.5

Angka Melek Huruf (Latin) Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas
Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2021-2023

Jenis Kelamin	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	96,29	98,75	98,18
Perempuan	95,26	97,43	95,71
Laki-laki + Perempuan	95,78	98,11	96,98

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Pandeglang Tahun 2023

Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, maka penduduk laki-laki lebih banyak yang sudah mampu membaca dan menulis, seperti terlihat pada

tabel 1.5 yaitu pada tahun 2023 untuk penduduk laki-laki sebesar 98,18 persen, sedangkan untuk perempuan sebesar 95,71 persen. Secara umum, kemampuan baca tulis masyarakat Pandeglang tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 baik secara total maupun jenis kelamin.

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama penduduk Pandeglang mampu menyekolahkan anaknya. Rata-rata lama sekolah penduduk Pandeglang tahun 2023 baru mencapai 7,15 tahun, ini berarti rata-rata pendidikan penduduk Pandeglang baru sampai jenjang SLTP kelas satu. Jadi secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Pandeglang baru lulus SD dan sedikit yang melanjutkan ke jenjang SLTP.

Dalam rangka meningkatkan program wajar dikdas 9 tahun kiranya masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang khususnya bagi Dinas/Instansi terkait. Program ini dikatakan berhasil apabila Angka Partisipasi Sekolah anak usia 7-15 tahun mencapai 100 persen, dengan kata lain seluruh anak usia SD dan SLTP dalam keadaan bersekolah. Melihat perkembangan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencapai rata-rata lama sekolah 9 tahun akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Kiranya dibutuhkan program-program untuk mempermudah akses masyarakat ke sarana pendidikan setingkat SLTP. Selain itu perlu juga menyadarkan masyarakat agar termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 1.6

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2021-2023

Tahun	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)
2021	7,10
2022	7,11
2023	7,15

Sumber : Susenas Tahun 2021 – 2023 dan Disdikpora Kab.Pandeglang

Selain indikator Angka Melek Huruf dan Ratarata Lama Sekolah, gambaran kualitas SDM Pandeglang dapat dilihat juga dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk itu sendiri. Pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun keatas di Pandeglang tahun 2023 paling banyak adalah masih tingkat SD sederajat yaitu sebesar 13,42 persen, sedangkan SLTP hanya 4,90 persen. Yang sangat mengkhawatirkan adalah pada tahun 2023 masih ada penduduk yang tidak/belum tamat SD sederajat yaitu mencapai 5,92 persen, dimana pada kelompok ini masih terindikasi adanya penduduk diluar usia wajar dikdas (usia dewasa/tua).

Tabel 1.7

Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

Tingkat Jenjang	Laki-laki (%)	Perempuan(%)	Total(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat	5,76	6,08	5,92
SD/MI/Sederajat	13,61	13,22	13,42
SLTP/Sederajat	4,91	4,90	4,90
SLTA/SMK/Sederajat ke atas	4,23	4,28	4,25
UNIVERSITAS	4,97	4,78	4,50
J U M L A H	28,50	28,48	28,49

Sumber : Disdikpora Kab.Pandeglang Tahun 2023

Bila melihat komposisi pendidikan yang ditamatkan berdasarkan gender, penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan penduduk perempuan yang belum atau tidak menamatkan SD sederajat. Di jenjangan Pendidikan SD, SLTP sederajat dan tinggkat Pendidikan SLTA sederajat laki-laki mengungguli dari perempuan. Untuk Jenjang Pendidikan Universitas perempuan kembali mengungguli laki laki hal interlihat dalam tabel 4.3 lulusan Universitas Laki-laki lebih mengungguli dibandingkan Perempuan sebanyak 4.97 persen.

TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH



Partisipasi sekolah anak di Pandeglang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD/Sederajat, SLTP/Sederajat maupun SLTA/Sederajat. Angka ini menunjukkan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) maupun SLTA (16-18 tahun). Angka ini juga menunjukkan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada.

APS Kabupaten Pandeglang untuk anak usia SD sebesar 99,62 persen. Ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak anak usia SD yaitu 7 sampai 12 tahun yang bersekolah mencapai 99,63 persen, sisanya sebesar 0,37 persen dari anak usia SD tersebut tidak bersekolah baik yang putus sekolah maupun yang belum pernah sekolah. Partisipasi sekolah anak usia SD perempuan relatif lebih baik dibandingkan dengan partisipasi anak usia SD laki-laki yaitu masing-masing 99,00 persen dan perempuan 100 persen.

Bila dibandingkan dengan partisipasi sekolah anak usia SD, partisipasi sekolah anak usia SLTP dan SLTA jauh lebih rendah, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat Pandeglang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APS SLTP tahun 2023 sebesar 96,15 persen dan APS SLTA sebesar 48,51 persen. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTP (usia 13-15), yang bersekolah hanya 95 anak, atau dari 100 anak usia SLTP ada sekitar 5 anak yang tidak bersekolah dengan berbagai alasan yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk anak usia SLTA menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTA (usia 16-18) hanya 57 anak yang sedang duduk di bangku sekolah.

Tabel 1.8

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2023

NO	JENIS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)	TAHUN		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	APS anak usia SD/MI/Sederajat	99,51	99,85	99,62
2	APS SLTP/Sederajat	95,03	97,66	96,15
3	APS SLTA/Sederajat	58,36	48,51	50,61
JUMLAH				

Sumber : Disdikpora Kab.Pandeglang Tahun 2021 - 2023

Bila dibandingkan berdasarkan gender, partisipasi sekolah anak usia SLTP (13-15 tahun) perempuan lebih baik dibandingkan anak laki-laki. Sedangkan untuk anak

usia SLTA (16-18 tahun) partisipasi sekolah anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki.

Selain APS, biasanya untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap sekolah digunakan juga Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Murni merupakan persentase penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang dimaksud. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar merupakan Persentase penduduk yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu.

Pada gambar 1.9 terlihat bahwa pada tahun 2023, Partisipasi Murni (APM) anak usia SD/MI/Sederajat tercatat sebesar 99,62, APM SLTP/Sederajat tercatat sebesar 82,03 sedangkan APM SLTA/Sederajat tercatat sebesar 48,51. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SD/MI/Sederajat, ada 95 anak yang bersekolah dan anak yang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan SD/MI/. Begitu juga halnya dengan partisipasi murni anak usia SLTP dan SLTA.

Tabel 1.9

Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2021-2023

NO	JENIS Angka Partisipasi Murni (APM)	TAHUN		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	APM anak usia SD/MI/Sederajat	98,15	99,85	99,62
2	APM SLTP/Sederajat	84,28	80,35	82,03
3	APM SLTA/Sederajat	51,40	48,51	43,24
JUMLAH				

Sumber : Disdikpora Kab.Pandeglang Tahun 2021 - 2023

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat tercatat sudah melampaui angka 100, yaitu mencapai angka 108,96. Hal ini menunjukkan program wajar dikdas 6 tahun sudah tercapai di kabupaten Pandeglang. Angka ini juga menunjukkan bahwa murid SD/MI/Sederajat yang bersekolah di Pandeglang cukup

banyak yang usianya tidak tepat 7- 12 tahun. Ini terjadi karena adanya anak yang terlambat sekolah sehingga usia di atas 12 tahun masih duduk di bangku SD/MI/Sederajat. Selain itu, anak yang terlalu cepat disekolahkan oleh orangtuanya sehingga usia 5 atau 6 tahun sudah disekolahkan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK SLTP dan SLTA pada tahun 2023 tercatat masing-masing sebesar 92,94 dan 75,19.

Tabel 1.10

Angka Partisipasi Kotor Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2021-2023

NO	JENIS Angka Partisipasi Kotor (APK)	TAHUN		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	APK anak usia SD/MI/Sederajat	106,91	105.39	105.26
2	APK SLTP/Sederajat	94,88	91.82	87,97
3	APK SLTA/Sederajat	76,66	75,19	60,03
JUMLAH				

Sumber : Disdikpora Kab.Pandeglang Tahun 2021-2023

Bila dibandingkan ketiga indikator partisipasi sekolah baik APS, APM maupun APK pada jenjang pendidikan SD, SLTP maupun SLTA dapat terlihat perbandingan antara anak yang bersekolah tepat pada usia sekolahnya. Untuk anak usia SD, APK lebih besar dibandingkan APS, ini menunjukkan bahwa anak yang usianya bukan usia SD tapi bersekolah di jenjang pendidikan SD/Sederajat lebih banyak dibandingkan anak usia SD yang bersekolah bukan di SD. Sedangkan anak usia SLTP dan SLTA juga sama.

FASILITAS PENDIDIKAN

Apabila berbicara tentang program pendidikan, hal yang paling penting adalah fasilitas pendidikan itu sendiri. Fasilitas pendidikan khususnya sarana berupa gedung merupakan hal yang penting karena merupakan tempat di mana terjadinya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain itu ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan berkualitas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu wilayah.

Jumlah Sarana Sekolah, Guru dan Siswa tahun ajaran 2020/2022 dapat dilihat pada **tabel 1.11** Tahun ajaran 2020/2022 rata-rata sekolah tingkat SD menampung 136.144 siswa dengan jumlah murid per guru rata-rata 0,059 orang dan sekolah Tingkat SLTP rata-rata menampung 40.253 siswa dengan jumlah murid rata-rata 0,056 orang per guru. Sedangkan untuk sekolah tingkat SLTA rata-rata menampung 42.467 siswa dengan rata-rata banyaknya murid per guru 0,0034 orang.

Tabel 1.11

Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah Kabupaten Pandeglang, Tahun 2023

Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD Sederajat	871	7.871	136.144	0,059	0,0064
SLTP Sederajat	168	2.881	40,253	0,056	0,067
SLTA Sederajat	144	2.615	42.467	0,061	0,0034

Sumber: Disdikpora Kab. Pandeglang Tahun 2023

Dengan melihat rasio murid guru, keadaan ini dinilai sudah cukup baik bahkan jumlah guru untuk mengawasi murid cenderung berlebih. Pada tahun ajaran 2022/2023 satu orang guru SD/MI mengajar atau mengawasi 16 sampai 17 orang siswa, satu orang guru SLTP mengajar atau mengawasi 16 sampai 17 orang siswa, satu orang guru SLTP mengajar atau mengawasi 12 sampai 13 orang siswa. Sedangkan satu orang guru SLTA mengajar atau mengawasi 14 sampai 15 orang siswa.

Bila dikaitkan dengan indikator pendidikan lainnya, terlihat ada hal yang cukup kontradiktif. Jumlah sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar cukup banyak, namun partisipasi masyarakat terhadap sekolah tingkat SLTP dan SLTA masih cenderung rendah. Ini mungkin menunjukkan bahwa program dari pemerintah sudah siap untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, namun respon masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi sehingga termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SLTP dan SLTA, sedangkan untuk tingkat SD sudah cukup baik.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari kondisi di atas adalah apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut tingkat sebarannya sudah merata atau justru

terkonsentrasi pada segmen-segmen tertentu, sehingga sebagian masyarakat pada wilayah- wilayah tertentu aksesnya masih sulit.

KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional diarahkan agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas dan merata sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial.

Masalah kesehatan merupakan persoalan penduduk selama hidup, oleh karenanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting. Bahkan pemerintah telah mengarahkan agar APBN/APBD lebih diprioritaskan ke sektor kesehatan selain pendidikan dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai dan mutu makanan yang dikonsumsi. Penanganan faktor tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang terkait.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup (AHH). Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan, yang antara lain diukur melalui angka kesakitan atau tingkat keluhan kesehatan.

Indikator Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup merupakan indikator utama yang menunjukkan derajat kesehatan penduduk. Pada tahun 2022 Jumlah Kematian Bayi 0-12 bulan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 198 menjadi 144 di tahun 2023. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 relatif meningkat dari 65,20 tahun (tahun 2022) menjadi 65,58 tahun (tahun 2023).Angka ini memberi makna bahwa setiap bayi di kabupaten Pandeglang yang lahir pada tahun 2023 mempunyai harapan untuk hidup selama 65,58 tahun.

Tabel 1.12

Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk

Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2023

Indikator Derajat kesehatan	2021	2022	2023
Jumlah Kematian Bayi *)	189	198	144
Angka Harapan Hidup (tahun) **)	64,79	65,20	65,58

Sumber : *) Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

***) Penghitungan Metode Baru Susenas Tahun 2021-2023

Gambaran mengenai status kesehatan penduduk biasanya dapat dilihat melalui indikator Angka Kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari table 1.13 pada tahun 2023 sebanyak 42 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggu aktivitasnya. Dibanding keadaan tahun sebelumnya, Angka Kesakitan cenderung menurun, dimana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 15,46 persen. Bila dibedakan berdasarkan gender, angka kesakitan penduduk laki-laki yaitu 16,80 persen lebih kecil dari pada penduduk perempuan yang sebesar 25,20 persen.

Tabel 1.13

Angka Kesakitan dan Rata-Rata Lamanya Sakit Penduduk
Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

Indikator Kesehatan	2023		
	L	P	Total
Angka Kesakitan (%)	16,8	25,2	42
Rata-Rata Lamanya Sakit (hari)	3,3	3,5	6,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang Tahun 2023

Rata-rata jumlah hari sakit atau terganggu aktivitas sehari-harinya pada tahun 2023 sebesar 3,60 hari. Rata-rata lamanya sakit penduduk laki-laki relatif lebih lama dibandingkan penduduk perempuan. Ratarata lamanya sakit penduduk perempuan 3,26 hari dan penduduk laki-laki 4,25 hari.

PEMERINTAHAN DAN KETERTIBAN

Dalam era keterbukaan aparat pemerintah haruslah profesional dalam kinerjanya, terutama dalam mengantisipasi keadaan dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sehingga diharapkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

tidak terdapat lagi di Kabupaten Pandeglang. Sikap aparat juga dipengaruhi oleh sistem, kelembagaan dan budaya masyarakat yang dilayani. Dengan demikian upaya perubahan dan pembahasan manajemen pemerintah harus lebih bersifat komprehensif dan integral.

Jumlah aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Pandeglang sampai akhir tahun 2023 sebanyak **8.314** ASN yang tersebar bekerja pada 68 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, 11 OPD berupa Lembaga Teknis Daerah, 15 OPD berupa Dinas Daerah dan 35 OPD berupa Kecamatan serta 13 Kelurahan.

Tabel 1.14

Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Pandeglang
berdasar Golongan Ruang Tahun 2023

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
I	25	4	29
II	556	343	899
III	2.184	2.918	5.102
IV	1.037	1.247	2.284
Jumlah	3.802	4.512	8.314

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

Tabel 1.15

Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah (PNS) Kabupaten Pandeglang
berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

SD	SLTP	SLTA/D I	D2	D3	S1/DIV	S2/SIII
----	------	----------	----	----	--------	---------

18	65	703	209	670	6080	569
----	----	-----	-----	-----	------	-----

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

LINGKUNGAN

Wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki luas sebesar 274.689 ha, yang terdiri dari hutan negara 56.501 ha, hutan rakyat 3.682,57 ha, lahan sawah 54.739 ha dan lainnya 136.409 ha. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan wilayah hutan dilakukan dengan pola pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat sekitar hutan dapat sejahtera dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Demikian juga dengan pengelolaan lahan sawah yang harus memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal.

1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.4.1. Struktur organisasi

Struktur organisasi unit-unit Pemerintah Kabupaten Pandeglang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, terdiri dari
 1. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan Kesehatan;
 3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan Sosial;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang merupakan Satuan Polisi pamong Praja Tipe B yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;



5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pariwisata;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Tipe B, menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B, menyelenggarakan urusan Perumahan dan kawasan permukiman serta Pertanahan;
15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan Perhubungan;
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan;
17. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan Kelautan dan Perikanan;

18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset.
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B merupakan unsur penunjang sebagian urusan pemerintahan bidang Keuangan dalam hal pajak daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A (instensitas besar) merupakan urusan pemerintahan badang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran klafikasi A merupakan urusan pemerintah dibaidang Penanggulangan Bencana daerah, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
6. Tiga puluh lima (35) Kecamatan ; dan
 7. Tiga belas (13) Kelurahan dan 326 Desa

1.4.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pandeglang tercermin pada tugas-tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas Bupati, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, organisasi, dan tatalaksana, dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, serta berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun

kebijakan, membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah lainnya, pembinaan generasi muda dan olah raga serta pembuatan LKIP tahunan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah diberikan fungsi sebagai berikut mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah kabupaten, menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, pembinaan generasi muda dan melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan data LKIP.

- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut: memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD, dan menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas. Fungsi Sekretariat DPRD adalah: memfasilitasi rapat anggota DPRD, melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD, dan mengelola tata usaha DPRD.
- c. Badan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Daerah di perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan.
- d. Dinas Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut : menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- e. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Camat melaksanakan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati. Untuk dapat melaksanakan tugasnya camat mempunyai fungsi sebagai berikut: memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Bupati, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas yang berada di wilayah kerjanya, dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Kelurahan dan Desa.

- f. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut: mendorong partisipasi masyarakat dan mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.

1.5 SISTEMATIKA LKjIP TAHUN 2023

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|--------------------------------|--|
| BAB I | : Pendahuluan | Menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP Tahun 2023. |
| BAB II | : Perencanaan Kinerja | Menjelaskan muatan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2023 dan perubahan perjanjian kinerja tahun 2023. |
| BAB III | : Akuntabilitas Kinerja | Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk dan pertanggungjawaban keuangan pada tahun 2023. |
| BAB IV | : Penutup | Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. |

Lampiran, berisi data pendukung dari LKIP Tahun 2023 yang terdiri dari :



1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Pandeglang Tahun 2023;
2. Realisasi Anggaran Kabupaten Pandeglang Tahun 2023;
3. Penghargaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 sampai Tahun 2023.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Kabupaten Pandeglang termuat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahun yang memuat 1 (*satu*) Visi, 5 (*lima*) Misi, 5 (*lima*) Tujuan, dan 30 (*tiga puluh*) Sasaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang harus dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang yang disajikan dalam LKjIP Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 ini berupa visi, misi, tujuan, sasaran dan program/ kegiatan.

A. VISI

Visi dan misi merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya bagi masa mendatang yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode tahun 2021-2026 adalah: **“Pandeglang Berkah, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Terwujudnya Pandeglang Berkah :

Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan *motto* yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang : Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH.

(2) Berdaya Saing :

Merupakan kemampuan daerah untuk berkompetisi dalam menarik sebesar-besarnya arus potensi ekonomi ke wilayahnya. Peningkatan daya saing daerah adalah salah satu tujuan utama dalam perencanaan pembangunan sebagaimana agenda pembangunan pada level nasional, regional pun demikian dengan halnya agenda pembangunan pada tataran local (Kabupaten Pandeglang). Untuk meningkatkan daya saing daerah ini, Kabupaten Pandeglang akan berfokus pada 4 (empat) aspek wajib dalam mewujudkan daya saing yang meliputi: peningkatan kemampuan ekonomi, infrastruktur/fasilitas wilayah, iklim investasi dan sumber daya manusia.

(3) Sejahtera :

Merupakan tujuan hidup yang diharapkan oleh seluruh bangsa di dunia, baik dalam hal sejahtera secara individu maupun dalam konteks yang lebih luas adalah sejahtera seluruh masyarakatnya. Dengan mengadopsi konsep IPM, maka sejahtera secara minimal adalah kondisi terpenuhinya 3 aspek dasar kehidupan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian hidup (perekonomian). Sejahtera adalah suatu kondisi yang diindikasikan dengan semakin menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat serta terpenuhinya sarana prasarana yang mendukung terhadap peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat. Untuk menuju sejahtera ini, maka poin krusialnya terletak pada peningkatan ekonomi daerah, sehingga LPE menjadi salah satu konsentrasi pembangunan untuk mengukur derajat peningkatan ekonomi daerah di satu aspek dan meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pengendalian pendapatan secara merata untuk seluruh warga masyarakat yang diukur dari menurunnya indeks gini kabupaten. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara fokus pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan pemerataan pendapatan di sisi lainnya.

B. MISI

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut:

- (1) Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi;
- (2) Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- (4) Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- (5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industry kecil dan menengah.

Kelima misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Upaya untuk merespon isu-isu yang berkaitan dengan rendahnya konektivitas dan ketangguhan wilayah serta infrastruktur daerah;
- (2) Upaya untuk merespon isu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- (3) Upaya untuk merespon isu belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- (4) Upaya untuk merespon isu rendahnya pertumbuhan investasi dan iklim usaha daerah;
- (5) Upaya untuk merespon isu belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor unggulan dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

C. TUJUAN

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur, pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup dalam mendukung konektivitas dan ketangguhan wilayah;

- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama dan memperluas peningkatan kesempatan belajar masyarakat, layanan kesehatan dan pendapatan masyarakat;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK;
- 4) Mewujudkan layanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, tepat dan akurat berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, serta ramah lingkungan;
- 5) Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi produktif bidang industry kecil dan menengah pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya peningkatan daya saing daerah.

D. SASARAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

1. Misi: *Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi*, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya konektivitas wilayah;
 - b. Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - c. Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - d. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
 - e. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten;
 - f. Meningkatnya aktivitas perekonomian;
 - g. Meningkatnya kinerja mitigasi dan penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Misi : *Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia*, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya layanan pendidikan;
 - b. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya local;
 - c. Menurunnya angka putus studi;
 - d. Meningkatnya layanan kesehatan;

- e. Menurunnya angka stunting;
 - f. Menurunnya permasalahan kesejahteraan social;
 - g. Meningkatnya penanganan anak terlantar dan anak jalanan;
 - h. Meningkatnya kemandirian desa;
 - i. Berkurangnya desa tertinggal dan sangat tertinggal;
 - j. Meningkatnya pemberdayaan perempuan;
 - k. Meningkatnya pemanfaatan potensi tenaga kerja dan partisipasi pemuda.
3. Misi : *Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan sasaran :*
- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan;
 - b. Meningkatnya kualitas penerapan TIK dalam pelayanan publik.
4. Misi : *Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran :*
- a. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
 - b. Meningkatnya nilai investasi;
 - c. Terkendalikannya kualitas lingkungan hidup.
5. Misi : *Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan sentra industry kecil dan menengah, dengan sasaran :*
- a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB;
 - b. Meningkatnya daya saing produk perikanan;
 - c. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
 - d. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan;
 - e. Meningkatnya kontribusi sektor industry terhadap PDRB;
 - f. Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi;
 - g. Meningkatnya pendapatan asli daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023

Dalam rangka mencapai tujuan, maka disusunlah sasaran strategis dengan indikator-indikator tertentu. Setiap tahunnya, target dari indikator sasaran strategis

ini ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

Sehubungan dalam rangka pendampingan yang sedang dilaksanakan bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ditemukan adanya ketidakselarasan di Visi dan Misi, dari itu laporan yang kami sajikan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mengacu pada sasaran strategis dan target Indikator Sasaran Strategis untuk tahun 2023 dapat dilihat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bupati
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Prosentase kondisi jalan kabupaten mantap	69,58	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penyelenggaraan Jalan		81.613.784.578	DPUPR	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
2.	Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh	3,56	%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	56,51	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Kawasan Permukiman		5.305.392.223	DPKPP	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		1.378.650.000	DPKPP	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
3.	Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan permukiman	Cakupan Layanan Air Bersih	72,68	%
		Cakupan Layanan Sistem Air Limbah Domestik	69,00	%
		Persentase Sampah Tertangani	78,00	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		80.250.000	DPKPP	
Program Pengelolaan Persampahan		9.621.969.000	DLH	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		11.047.588.000	DPUPR	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		7.337.367.000	DPUPR	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	78,34	%
		Sasaran ini didukung oleh program:		
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		544.600.000	DISHUB	
Program Pengelolaan Pelayaran		8.000.000	DISHUB	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten	Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW	65,07	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penataan Bangunan Gedung	1.162.700.000	DPUPR	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
6. Meningkatkan Aktivitas Perekonomian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,46	Nilai
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
7. Meningkatkan Kinerja Mitigasi dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Indeks Risiko Bencana	121,90	Nilai
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penanggulangan Bencana	1.659.375.000	BPBD	
Program Penanggulangan Bencana	511.591.000	DINSOS	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
8.	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	7,67	Tahun
		Harapan Lama Sekolah	13,53	Tahun
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
9.	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	Jumlah Tradisi dan Budaya yang Diproduksi Sebagai Seni Kreasi Tradisional	20	Jumlah
		Sasaran ini didukung oleh program:		
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengembangan Kebudayaan		208.375.000	DISPARBUD	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
10.	Menurunnya Angka Putus Studi	Angka Putus Sekolah SD	0	%
		Angka Putus Sekolah SLTP	1	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Pendidikan		326.562.812.264	DISDIKPORA	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
11.	Meningkatnya Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	66,67	%
		Sasaran ini didukung oleh program:		
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		1.340.000.000	RSUD BERKAH	



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.612.488.000	DINKES
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	402.648.000	DINKES

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
12. Menurunnya Angka Stunting	Prevalensi Balita Stunting	16	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	14.475.587.550	RSUD BERKAH	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	95.134.544.751	DINKES	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
13. Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	10,21	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	40.400.000	DINSOS	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
14. Meningkatkan Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	7,88	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Rehabilitasi Sosial	2.231.865.000	DINSOS	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
15. Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	3	Desa
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penataan Desa	20.000.000	DPMPD	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
16. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	86,8	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	684.075.000	DP2KBP3A	



Program Perlindungan Perempuan	581.082.500	DP2KBP3A
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	385.800.000	DP2KBP3A

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
17. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja dan Partisipasi Pemuda	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,32	%
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	8,32	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	362.458.000	DISNAKERTRANS	
Program Hubungan Industrial	-	DISNAKERTRANS	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
18. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Nilai
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	7.149.512.800	SETDA	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
19.	Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK dalam Pelayanan Publik	Indeks Evaluasi SPBE	3,70	Nilai
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Informasi dan Komunikasi Publik		947.000.000	DISKOMSANTIK	
Program Aplikasi Informatika		1.033.000.000	DISKOMSANTIK	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
20.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	87,83	Nilai
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		354.700.000	DPMPSTP	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		1.740.000	DPMPSTP	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
21. Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Investor berskala nasional (PMDA/PMA)	55,27	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	60.875.000	DPMPTSP	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
22. Terkendalikannya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	35,00	Nilai
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	90.050.000	DLH	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	7.500.000	DLH	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	566.651.250	DLH	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
		TARGET	SATUAN
23. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian	34,00	%
Sasaran ini didukung oleh program:			
NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.127.521.250	DPKP	



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.375.791.000	DPKP
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	458.825.000	DPKP
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.500.000	DPKP
Program Perizinan Usaha Pertanian	-	DPKP
Program Penyuluhan Pertanian	7.056.450.000	DPKP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
24.	Meningkatnya Daya Saing Produk Perikanan	Persentase Capaian Target Produksi Perikanan	17,39	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		1.761.000.000	DINAS PERIKANAN	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		5.617.242.000	DINAS PERIKANAN	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		925.000.000	DINAS PERIKANAN	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
25.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	83	Nilai
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		-	DPKP	



Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	139.000.000	DPKP
Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	DPKP
Program Pengawasan Keamanan Pangan	5.000.000	DPKP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
26.	Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Rata-Rata Lama Menginap Tamu	1,344	Hari
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		347.000.000	DISPARBUD	
Program Pemasaran Pariwisata		251.152.643	DISPARBUD	
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		221.000.000	DISPARBUD	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
27.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri	3,31	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		143.900.000	DISKOPERINDAG	



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
28.	Meningkatnya Daya Saing UMKM dan Koperasi	Peningkatan UMKM Aktif	1,5	%
		Peningkatan Koperasi Aktif	3,00	%
Sasaran ini didukung oleh program:				
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pemberdayaan UMKM		45.000.000	DISKOPERINDAG	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	2023	
			TARGET	SATUAN
29.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Peningkatan PAD	8	%
		Sasaran ini didukung oleh program:		
NAMA PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		574.630.000	BAPENDA	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		454.276.314	BPKD	

Untuk penjelasan lebih lanjut kami sampaikan dalam dokumen capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KABUPATEN PANDEGLANG

Akuntabilitas kinerja pada hakekatnya menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk fasilitasi atas pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat.

Pada bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang mencakup capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026. Capaian Indikator sasaran strategis merupakan capaian indikator makro, indikator kinerja dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator sasaran strategis yang merupakan pencapaian dari rata-rata pelaksanaan outcome/output dari program/kegiatan yang terhimpun berdasarkan sasaran strategis yang ada di RPJMD. Indikator Kinerja Makro Pembangunan merupakan indikator kinerja yang dihasilkan/ distimulasi dari beberapa variabel yang saling terkait antara lain kinerja pemerintahan, swasta, dan partisipasi masyarakat. Selain itu capaian indikator makro ini dapat diperbandingkan antar Pemerintah Daerah yang lain, karena umumnya indikator kinerja makro ini juga digunakan secara seragam oleh Pemerintah Daerah lainnya.

Gambaran organisasi publik yang sehat tercermin dari tingkat capaian kinerja yang optimal yang diukur dari indikator kinerja yang terukur sesuai dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Tahun 2018 ini merupakan momentum yang penting bagi Kabupaten Pandeglang untuk tetap berkomitmen menunjukkan kesungguhan kinerjanya bagi terselenggaranya pemerintahan yang melayani bagi seluruh elemen masyarakat dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Pandeglang pada umumnya secara holistik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Pandeglang yang sudah tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1	>85 -100	AA	Memuaskan
2	>75-85	A	Sangat Baik
3	>65-75	B	Baik
4	>50-65	CC	Cukup Baik (Memadai)
5	>30-50	C	Agak Kurang
6	0-30	D	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1.1.1 Perjanjian Kinerja Ke satu : *Meningkatnya konektivitas wilayah*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya konektivitas wilayah	Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	%	66,73	68,87	103,21	69,58	70,57	101,42

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator sasaran strategis dengan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **101,42%**

3.1.1.2 Perjanjian Kinerja Ke dua : *Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
2	Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	3,78	2,78	73,54	3,56	2,57	72,17
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	58,51	50,72	86,69	56,51	49,78	88,09



Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **2 (dua)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **80,14%**

3.1.1.3 Perjanjian Kinerja Ke tiga : *Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan permukiman*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
3	Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan permukiman	Cakupan Layanan Air Bersih	%	72,42	71,40	98,59	72,68	86,19	118,59
		Cakupan Layanan Sistem Air Limbah Domestik	%	68,74	61,05	88,81	69	76,57	110,97
		Persentase Sampah Tertangani	%	79,00	54,00	68,35	78,00	57,76	74,05

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **3 (Tiga)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **101,20%**

3.1.1.4 Perjanjian Kinerja Ke empat : *Meningkatnya kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	78,34	77,56	99,00	78,34	78,32	99,97

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (*Satu*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **99,97%**

3.1.1.5 Perjanjian Kinerja Ke lima : *Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten	Tingkat Kepatuhan terhadap RTRW (%)	%	64,77	64,70	99,89	65,07	65,12	100,08



Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **100,08%**

3.1.1.6 Perjanjian Kinerja Ke enam : *Meningkatnya Aktivitas Perekonomian*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
6	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Nilai	4,24	3,42	80,66	4,46	2,53	56,73

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **56,73%**

3.1.1.7 Perjanjian Kinerja Ke tujuh : *Meningkatnya Kinerja Mitigasi dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
7	Meningkatnya Kinerja Mitigasi dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	140,46	203,05	69,18	121,90	169,21	72,04



Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **72,04%**

3.1.1.8 Perjanjian Kinerja Ke delapan : *Meningkatnya Layanan Pendidikan*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
8	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,13	95,32	7,67	7,15	93,22
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,51	13,72	101,55	13,53	13,73	101,48

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **2 (dua)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **97,35%**

3.1.1.9 Perjanjian Kinerja Ke sembilan : *Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
9	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	Jumlah Tradisi dan Budaya yang Diproduksi Sebagai Seni Kreasi Tradisional	Jumlah	20	10	50	20	23	115,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (*Satu*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **115,00 %**

3.1.1.10 Perjanjian Kinerja Ke sepuluh : *Menurunnya Angka Putus Studi*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
10	Menurunnya Angka Putus Studi	Angka Putus Sekolah SD	%	0	0,51	99,50	0	0,01	99,80



		Angka Putus Sekolah SLTP	%	2	2,55	78,43	1	0,09	111,11
--	--	--------------------------	---	---	------	-------	---	------	--------

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **105,46%**

3.1.1.11 Perjanjian Kinerja Ke sebelas : *Meningkatnya Layanan Kesehatan*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
11	Meningkatnya Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,00	65,23	98,83	66,67	65,58	98,37

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **98,37%**

3.1.1.12 Perjanjian Kinerja Ke duabelas : *Menurunnya Angka Stunting*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
12	Menurunnya Angka Stunting	Prevalensi Balita Stunting	%	18	29,4	69,44	16	29,4	54,42

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (*Satu*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **54,42%**

3.1.1.13 Perjanjian Kinerja Ke tigabelas : *Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
13	Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	%	9,97	15,73	63,38	10,21	18,98	185,90

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (*Satu*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **185,90%**

3.1.1.14 Perjanjian Kinerja Ke empatbelas : *Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
14	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	%	7,34	6,32	86,10	7,88	7,88	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kerjanya adalah **100,00%**

3.1.1.15 Perjanjian Kinerja Ke limabelas : *Meningkatnya Kemandirian Desa*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
15	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa	2	1	50	3	3	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kerjanya adalah **100,00%**

3.1.1.16 Perjanjian Kinerja Ke enambelas : *Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
16	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	86,77	86,83	100,07	86,8	86,83	100,03

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **100,03%**

3.1.1.17 Perjanjian Kinerja Ke tujuhbelas : *Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja dan Partisipasi Pemuda*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
17	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja dan Partisipasi Pemuda	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	8,57	9,24	107,82	8,32	9,05	108,77
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	8,57	7,66	89,38	8,32	8,93	107,33

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **2 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **108,05%**

3.1.1.18 Perjanjian Kinerja Ke delapanbelas : *Meningkatnya Pengelolaan dan Produk Maritim Bisnis*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
18	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	CC	89,32	B	B	112,22

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **112,22%**

3.1.1.19 Perjanjian Kinerja Ke sembilanbelas : *Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK dalam Pelayanan Publik*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
19	Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK dalam Pelayanan Publik	Indeks Evaluasi SPBE	Nilai	3,50	2,47	70,57	3,70	3,14	84,86

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **84,86%**

3.1.1.20 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh : *Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
20	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	Indeks Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Nilai	86,96	84,85	97,57	87,83	95,88	109,17

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (*Satu*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **109,17%**

3.1.1.21 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh satu : *Meningkatnya nilai investasi*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
21	Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Jumlah investor berskala	%	40,36	25,12	62,24	55,27	40,56	73,39



		nasional (PMDA/PM A)						
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **73,39%**

3.1.1.22 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh dua : *Terkendalikannya Kualitas Lingkungan Hidup*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
22	Terkendalikannya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	Nilai	33,00	32,00	96,97	35,00	33,00	94,29

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **94,29%**

3.1.1.23 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh tiga : *Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB.*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
23	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian	%	33,99	32,09	94,41	34	33,55	98,68

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (Satu)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **98,68%**

3.1.1.24 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh empat : *Meningkatnya Inovasi pada sektor Agro, Maritim dan Wisata*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
24	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Persentase Capaian Target Produksi Perikanan	%	14,39	2,26	15,71	17,39	12,73	73,20

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki **1 (tujuh)** indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **73,20%**



3.1.1.25 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh lima : Meningkatkan ketahanan pangan daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
25	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	82,1	70,05	85,32	83	70,05	84,40

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (*Satu*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **84,40%**

3.1.1.26 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh enam : Meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
26	Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	Rata-rata Lama Menginap Tamu	Hari	1,343	1,25	93,08	1,344	1,25	93,01

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (*Satu*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **93,01%**



3.1.1.27 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh tujuh : Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
27	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri	%	2,47	0,636	25,75	3,31	1,27	38,37

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (**Satu**) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **38,37%**

3.1.1.28 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh delapan : Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
28	Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi	Peningkatan UMKM Aktif (%)	%	1,5	1,23	82,00	1,5	1,28	85,33
		Peningkatan Koperasi Aktif (%)	%	3,00	2,525	84,17	3	2,56	85,33



Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 2 (*dua*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **85,33%**

3.1.1.29 Perjanjian Kinerja Ke dua puluh sembilan : *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	SATUAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
				TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
29	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Peningkatan PAD (%)	%	1,37	1,37	100	8,00	7,01	87,63

Dari tabel diatas terlihat bahwa sasaran strategis ini memiliki 1 (*Satu*) indikator kinerja dengan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut telah terlaksana dengan pencapaian kinerjanya adalah **87,63%**

3.2 PENCAPAIAN KINERJA

3.2.1 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN MISI

Evaluasi capaian kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2026, didasarkan pada capaian rata-rata nilai misi Kabupaten Pandeglang yang dihitung berdasarkan capaian sasaran strategis Kabupaten Pandeglang sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pencapaian misi pertama yaitu *“Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi”* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya konektivitas wilayah;
 - b. Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - c. Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - d. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
 - e. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - f. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian;
 - g. Meningkatnya Kinerja Mitigasi dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana;

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **90,53%** dengan kriteria penilaian *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi pertama. Gambaran umum capaian nilai kinerja berdasarkan misi pertama dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Pertama

Misi ke 1	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2022	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2023
<i>Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi</i>	1. Meningkatnya konektivitas wilayah	103,42	1,16	117,74	89,76	90,53
	2. Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	80,14	0,92	73,51		
	3. Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan permukiman	101,20	1,16	117,23		
	4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten	99,97	1,14	114,40		
	5. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten	100,08	1,15	114,63		
	6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian	56,73	0,65	36,83		
	7. Meningkatnya Kinerja Mitigasi dan Penanggulangan	72,04	0,82	59,40		

	Kedaruratan Bencana					
--	------------------------	--	--	--	--	--

sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi kedua yaitu “ *Mendorong Peningkata Kualitas Sumber Daya Manusia* ” dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Layanan Pendidikan;
 - b. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal;
 - c. Menurunnya Angka Putus Studi;
 - d. Meningkatnya Layanan Kesehatan;
 - e. Menurunnya Angka Stunting;
 - f. Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial;
 - g. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan;
 - h. Meningkatnya Kemandirian Desa;
 - i. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan;
 - j. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja dan Partisipasi Pemuda;

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut di atas adalah **115,26%** dengan kriteria penilaian *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi kedua. Gambaran umum capaian nilai kinerja berdasarkan misi pertama dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.12.

Tabel 3.12

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Kedua

Misi ke 2	Sasaran	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2022	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2023
<i>Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</i>	1. Meningkatnya Layanan Pendidikan	97,35	0,91	89,02	85,05	115,26
	2. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	115,00	1,08	124,23		
	3. Menurunnya Angka Putus Studi	105,46	0,99	104,46		
	4. Meningkatnya Layanan Kesehatan	98,37	0,92	90,89		
	5. Menurunnya Angka Stunting	54,42	0,51	27,82		
	6. Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial	185,90	1,75	324,61		
	7. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	100,00	0,94	93,93		
	8. Meningkatnya Kemandirian Desa	100,00	0,94	93,93		
	9. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	100,03	0,94	94,00		
	10. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja dan Partisipasi Pemuda	108,05	1,01	109,67		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi ketiga yaitu *“Meningkatkan Kualitas pelayanan publik”* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK dalam Pelayanan Publik;

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **100,44%** dengan kriteria *sangat baik*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi ketiga. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi ketiga dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Ketiga

Misi ke 3	SASARAN	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2022	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	112,22	1,14	127,79	81,04	100,44
	Meningkatnya Kualitas Penerapan TIK dalam Pelayanan Publik	84,86	0,86	73,09		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi keempat yaitu *“Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi dalam Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
 - b. Meningkatnya nilai investasi;
 - c. Terkendalikannya Kualitas Lingkungan Hidup.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **94,61%**, dengan kriteria *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi keempat. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi keempat dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Misi Keempat

Misi ke 4	SASARAN	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2022	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2023
Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan	1. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	109,17	1,18	129,14	88,78	94,61
	2. Meningkatnya nilai investasi	73,39	0,80	58,36		
	3. Terkendalikannya Kualitas Lingkungan Hidup	94,29	1,02	96,34		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

- Pencapaian misi kelima yaitu *"Meningkatkan Pemberdayaan dalam Upaya Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Parawisata dan Sentra Industri Kecil dan Menengah"* dihitung berdasarkan rata-rata nilai capaian indikator-indikator yang terhimpun dalam sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB;
 - b. Meningkatnya daya saing produk perikanan;
 - c. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
 - d. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan;
 - e. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 - f. Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi;
 - g. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Rata-rata nilai capaian (perbandingan realisasi dengan target) pada sasaran tersebut adalah **84,37%**, dengan kriteria *memuaskan*. Nilai ini merupakan nilai capaian kinerja berdasarkan misi kelima. Gambaran umum capaian kinerja berdasarkan misi kelima dapat terlihat sebagaimana Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Target, Realisasi dan Capaian kinerja Misi Kelima

Misi ke 5	SASARAN	Tingkat Capaian	Bobot	Nilai Capaian	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2022	Capaian Akuntabilitas Berdasarkan Misi Tahun 2023
<i>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan sentra industri kecil dan menengah</i>	1. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB	98,68	1,23	121,58	85,79	84,37
	2. Meningkatnya daya saing produk perikanan	73,20	0,91	66,91		
	3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	84,40	1,05	88,94		
	4. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan	93,01	1,16	108,01		
	5. Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	38,37	0,48	18,38		
	6. Meningkatnya daya saing UMKM dan Koperasi	85,33	1,07	90,92		
	7. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	87,63	1,09	95,87		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

3.1.4 PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN VISI

Capaian kinerja berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang dihitung berdasarkan rata-rata dari hasil perkalian antara nilai capaian tiap misi dengan bobot atas dasar kedekatan dengan visi. Gambaran lebih jelasnya mengenai capaian nilai kinerja

berdasarkan visi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Berdasarkan Visi Kabupaten Pandeglang

No	Misi	Capaian Misi	Bobot	Nilai Misi	Capaian Kinerja berdasarkan Visi Tahun 2022	Capaian Kinerja Berdasarkan Visi Tahun 2023
1	Memantapkan infrastruktur akses pendidikan, kesehatan dan pusat pertumbuhan ekonomi	90,53	0,93	84,46	86,19	98,18
2	Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	115,26	1,19	136,89		
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	100,44	1,03	103,95		
4	Meningkatkan kemudahan berinvestasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	94,61	0,97	92,24		
5	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan sentra industri kecil dan menengah	84,37	0,87	73,36		

Sumber : RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026, BPS Kabupaten Pandeglang dan Hasil Analisis

3.3. REALISASI ANGGARAN KABUPATEN PANDEGLANG

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang lebih berperan pada fungsi alokasi karena lebih mengetahui kebutuhan serta Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakatnya. Sementara fungsi distribusi dan stabilisasi, efektifnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

APBD sebagai sarana otonomi dan gambaran kebijakan Pemerintah Daerah disusun mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara operasional APBD merupakan alat untuk mengukur kemampuan potensi dan sebagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Secara keseluruhan, APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 dapat di rinci sebagai berikut :

1. Pendapatan

Kondisi Umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan produk hukum aturan pengelolaan keuangan yang lebih tinggi.

Adapun struktur Pendapatan Daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Lain-lain PAD yang Sah
- 2) **Pendapatan Transfer**
- Dana Transfer Pemerintah Pusat
 - Dana Transfer Antar Daerah
- 3) **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**
- Pendapatan Hibah
 - Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Keetentuan Peraturan Perundang-undangan

a. **Target dan Realisasi Pendapatan**

Pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang pada APBD tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar **Rp 2.830.711.411.400,35** atau 92,82% dari target yang ditetapkan sebesar **Rp 2.564.889.822,694,00** Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023 secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.564.889.822,694,00	2.830.711.411.400,35	92,82
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	291.688.325.049,00	207.941.249.307,35	71,29
4.1.01	Pajak Daerah	89.068.138.143,00	71.538439.873,00	80,32
4.1.02	Retribusi Daerah	18.116.644.700,00	16.631.304.934,00	91,80
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.660.598.949,00	16.660.598.949,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	167.842.943.257,00	103.110.905.551,35	61,43
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.273.052.870.645,00	1.988.534.920.409,00	95,59
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.109.408.489.970,00	2.055.790.542.126,00	94,27
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.644.380.675,00	184.171.753.603,00	112,54
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148.627.000,00	63.518.000,00	42,74
4.3.01	Pendapatan Hibah	148.627.000,00	63.518.000,00	42,74
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	-	-	99,10

	Peraturan Perundang-undangan			
--	------------------------------	--	--	--

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2023 (unaudited)

4) Belanja Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2022, belanja daerah terealisasi sebesar Rp 2.387.839.063.605,00 atau 89,68 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.662.500.897.974,00. secara umum target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.19

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
5	BELANJA	2.662.500.897.974,00	2.387.839.063.605,00	89,68
5.1	BELANJA OPERASI	1.894.199.386.854,00	1.646.518.043.180,00	86,92
5.1.01	Belanja Pegawai	1.154.330.659.476,00	1.009.151.464.352,00	95,22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.860.711.256,00	471.719.153.002,00	72,48
5.1.03	Belanja Bunga	180.000.000,00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	85.714.474.122,00	72.429.875.826,00	84,50
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.213.542.000,00	3.137.550.000,00	97,64
5.2	BELANJA MODAL	300.368.211.846,00	278.857.992.322,00	92,84
5.2.01	Belanja Modal Tanah	392.500.000,00	387.325.600,00	98,68
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.694.565.612,00	54.898.993.473,00	82,31
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.244.709.979,00	125.188.293.363,00	96,86
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.379.720.955,00	98.328.379.886,00	96,04
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.656.715.300,00	55.000.000,00	3,32
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.293.653.790,00	4.220.861.231,00	98,30
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.293.653.790,00	4.220.861.231,00	98,30
5.4	BELANJA TRANSFER	463.639.645.484,00	458.242.166.872,00	98,84
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.721.330.684,00	5.358.948.892,00	49,98

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	452.918.314.800,00	452.883.217.980,00	99,99
	Total Surplus/(Defisit)	(97.611.075.280,00)	7.127.622.204,35	(7,30)

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2023 (unaudited)

5) Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel. 3.20

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
6	PEMBIAYAAN	97.611.075.280,00	97.611.075.280,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.611.075.280,00	97.611.075.280,00	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.611.075.280,00	97.611.075.280,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	97.611.075.280,00	97.611.075.280,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	97.611.075.280,00	97.611.075.280,00	100,00
6.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	90.483.453.075,85	-

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2023 (unaudited)

Saldo Kas

Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 menghasilkan saldo kas sebesar Rp. 0 Sisa ini didapat dari selisih antara surplus belanja daerah ditambah penerimaan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.21

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
21.	Pendapatan	2.830.711.411.400,35
2.	Belanja	2.387.839.063.605,00
3.	Surplus/Defisit	7.127.622.204,35

4.	Pembiayaan Netto	97.611.075.280,00
5.	Sisa Perhitungan APBD	90.483.453.075,85

Sumber: BPKD Kabupaten Pandeglang 2023

Pelaksanaan APBD sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta tuntutan perubahan di era reformasi yang berkembang akhir-akhir ini. Beberapa penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilaksanakan, namun sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bernuansa lebih memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan pokok Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah melaksanakan restrukturisasi Anggaran Pendapatan Daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Pandeglang dewasa ini tidak hanya mengacu kepada satu peraturan perundangan saja (*omnibus regulations*) melainkan juga mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka menghasilkan sistem akuntansi yang lebih kompatibel, komprehensif dan bertanggungjawab. Selain itu, banyaknya dasar hukum yang dijadikan acuan (konsideran) dalam penyusunan APBD ini diharapkan juga akan mampu memberikan beberapa aspek positif, antara lain:

1. Kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Adanya Sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan;
3. Memberikan arah sekaligus tidak membingungkan pihak pelaksana dan
4. Pemeriksa keuangan;
5. Memperhatikan kapasitas fiskal daerah.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan 75 program, 29 sasaran strategis, 33 urusan pemerintah daerah dan 9 fungsi. Program/ kegiatan tersebut mendorong/ menstimulus nilai kinerja sasaran terhadap pencapaian visi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 sebesar **98, 18%** dan masuk pada kategori “sangat memuaskan”.

Dilihat dari pencapaian keseluruhan dalam pencapaian kinerja tahun 2023 ini masih perlu adanya penyempurnaan dan peningkatan secara optimal, berdasarkan komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen tersebut :

- a. Perencanaan.
- b. Pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen - komponen tersebut harus dievaluasi kembali agar penerapan Sistem AKIP dapat lebih sempurna dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pembangunan khususnya yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang (RPJMD).

4.2 SARAN

Sasaran Strategis tahun 2023 merupakan keberlanjutan sasaran strategis dari tahun sebelumnya dalam periode RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026. Hal ini tentu saja perlu adanya peningkatan keberlanjutan dokumen-dokumen perencanaan turunannya, selain itu pencapaian indikator-indikator sasaran strategis, diharapkan agar memperoleh nilai pencapaian yang lebih baik sehingga dapat



meningkatkan nilai capaian sasaran strategis pada pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Periode ke-dua dimasa jabatan Tahun 2021-2024.

Selain itu, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pembangunan, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam semua tahap pembangunan yang lebih intensif antar instansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam memperkuat pencapaian nilai akuntabilitas kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya evaluasi dan kajian kembali terhadap rencana strategis, indikator kerja, rencana kerja, dan perjanjian kinerja SKPD untuk lebih melihat dan menilai keselarasan program-program SKPD dengan RPJMD dan konektivitas program antar SKPD yang mendukung keberhasilan pencapaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

PENGHARGAAN- PENGHARGAAN TAHUN 2021-2023



Penghargaan Daerah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tercepat sebagai realisasi dana Transfer terbaik tahun 2023 dari DJP Provinsi Banten Tahun 2023



Penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Provinsi Banten Tahun 2023



Penghargaan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2023



Penghargaan peringkat 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2023



Penghargaan Kabupaten Pandeglang dalam Pangan Nasional dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2023



**Penghargaan Lencana Bakti Pembangunan Daerah Dari Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023**



**Penghargaan Adhyakarya Pratama Pembangunan Pertanian oleh Kementerian
Pertanian Republik Indonesia Tahun 2023**



Pemkab Pandeglang Meraih 3 Penghargaan diajang Top Awards 2022



Penghargaan Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022



Pemkab pandeglang raih penghargaan anugerah meritokrasi kasn 2022 sebagai instansi pemerintah dengan kategori “baik”



Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2022



Launcing Desa Digital Pertama di Kabupaten Pandeglang bersama Bank BJB Tahun 2022



Penghargaan Desa Bandung menjadi lima besar dalam lomba Desa Tingkat Nasional tahun 2022 oleh Kemendagri



Pemerintah Pandeglang meraih Penghargaan Peringkat 3 terbaik dari BPKAD Provinsi Banten dengan Kategori Baik Tahun 2022



Pemerintah Pandeglang meraih 6 Penghargaan dalam Kegiatan Gebyar Hari Kesehatan Nasional ke 581 Tingkat Provinsi Banten Tahun 2022



Penghargaan Anugerah Parahita Ekaparya dan Kota Layak Anak Tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021



Penghargaan Cendekiawan Kampung Award Tahun 2021



Penghargaan Moeslem Choice Award dalam kategori Vice Major of Good performance tahun 2022



Penghargaan Tingkat Nasional dalam acara puncak peringatan hari Malaria Se-Dunia tahun 2022



**Penghargaan Tingkat Nasional dalam acara TOP BUMD Award Tahun 2022 dengan
Kategori TOP Pembina BUMD Tahun 2022**



**Penghargaan Tingkat Nasional dalam acara TOP BUMD Award Tahun 2022 dengan
Kategori TOP Pembina BUMD Tahun 2022**



Penghargaan sebagai Badan Layanan Publik yang Informatif Tahun 2021



Penghargaan INAGARA Award inovasi Administrasi Negara Tahun 2021 oleh LAN RI tahun 2021



**Penghargaan DPMPTSP sebagai Kategori Pelayanan Prima dengan nilai "A" dari
KemenpanRB Tahun 2022**



**Penghargaan Predikat kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
Tahun 2022**



KABUPATEN
PANDEGLANG

Prestasi
KABUPATEN
PANDEGLANG
Tahun 2021

7.

Penghargaan Parahita Ekapraya (APE)
Tahun 2020 Kategori Pratama



8.

Penghargaan Kabupaten Layak Anak
(KLA) Tingkat Madya



Kategori "PELAYANAN PRIMA"

9.

Penghargaan dan Tanda
Kehormatan Wredatama Nugraha
Utama



#PandeglangBergerakPasti



KABUPATEN
PANDEGLANG

Prestasi
KABUPATEN
PANDEGLANG
Tahun 2021

10.

Penghargaan Kategori Pencapaian
Program Kesehatan Jiwa Terbaik
se-Provinsi Banten



Penghargaan Badan Publik Informatif
Tahun 2021



12.

Penghargaan Ke III untuk
MTQ XVIII Provinsi Banten



Penghargaan Cendekiawan
Kampung Award 2021



#PandeglangBergerakPasti

Daftar Penghargaan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang

TAHUN 2021-2023

NO	NAMA PENGHARGAAN	KEMENTERIAN / LEMBAGA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penghargaan Daerah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tercepat sebagai realisasi dana Transfer terbaik tahun 2023 dari DJP Provinsi Banten Tahun 2023	DJP Provinsi Banten	2023
2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Provinsi Banten Tahun 2023	Pemprov Banten	2023
3	Penghargaan Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2023	BPK Provinsi Banten	2023
4	Penghargaan peringkat 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023	Pemprov Banten	2023
5	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2023	KIP Provinsi Banten	2023
6	Penghargaan Kabupaten Pandeglang dalam Pangan Nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2023	Kementerian Pertanian RI	2023
7	Penghargaan Lencana Bakti Pembangunan Daerah Dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023"	Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI	2023
8	Penghargaan Adhykarya Pratama Pembangunan Pertanian oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2023	Kementerian Pertanian RI	2023
9	Penghargaan dalam ajang Top BUMD Awards 2022.	TopBusiness	2022

10	Penghargaan Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2022	Kepala BPK RI Provinsi Banten	2022
11	Anugerah meritokrasi kasn 2022 sebagai instansi pemerintah dengan kategori "baik"	Kepala KASN RI	2022
12	Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2022	Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten	2022
13	Launcing Desa Digital Pertama di Kabupaten Pandeglang bersama Bank BJB Tahun 2022	Bupati Pandeglang & Bank BJB	2022
14	Penghargaan Desa Bandung menjadi lima besar dalam lomba Desa Tingkat Nasional tahun 2022	Mentri Dalam Negeri	2022
15	Penghargaan Peringkat 3 terbaik dari BPKAD Provinsi Banten dengan Kategori Baik Tahun 2022	BPKAD PROVINSI BANTEN	2022
16	Penghargaan dalam Kegiatan Gebyar Hari Kesehatan Nasiona ke 581 Tingkat Provinsi Banten Tahun 2022	Gubernur Banten	2022
17	penghargaan Cendekiawan Kampung Award 2021	Cendekiawan Kampung	2021
18	Penghargaan Moeslem Choice Award dalam kategori Vice Major of Good performance tahun 2022	Direktur Moeslim Magazine	2022
19	Penghargaan Tingkat Nasional dalam acara puncak peringatan hari Malaria Se-Dunia tahun 2022	Mentri Kesehatan RI	2022
20	Penghargaan Tingkat Nasional dalam acara TOP BUMD Award Tahun 2022 dengan Kategori TOP Pembina BUMD Tahun 2022	Majalah Top Busines	2022
21	Penghargaan Tingkat Nasional dalam acara TOP BUMD Award Tahun 2022 dengan Kategori TOP Pembina BUMD Tahun 2022	Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten	2022
22	Penghargaan sebagai Badan Layanan Publik yang Informatif Tahun 2021	Komisi Informasi Provinsi Bante	2021
23	Penghargaan Inagara Award Tahun 2021	LAN RI	2021
24	Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan kategori Pelayanan Prima	Menpan RB RI	2021
25	Penghargaan Predikat kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Tahun 2022	Ombudsmn RI	2022
26	Predikat "BB" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Menpan RB RI	2022